

ABSTRAK

Yenni Mawar F Br.Hutapea, NIM : 3123311064, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan struktur pemerintahan yang ada di desa, dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa dan dilakukan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengikut sertakan masyarakat desa. Harapan dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah diakuinya eksistensi desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan jelas, desa mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), dana desa berperan untuk mewujudkan swasembada pangan dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Alat pengumpulan data dengan mewawancarai Kepala Desa, Kepala Urusan Pembangunan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), observasi dan penyebaran angket kepada 107 masyarakat yang dipilih secara *purposive sampling*. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *verification*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kurangnya pemahaman masyarakat akan Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan hasil angket yang diberikan kepada 107 responden yang dipilih secara *purposive* bahwa 12,15 masyarakat memahami Undang-Undang Desa tersebut, sementara 87,85 responden dari masyarakat tidak memahami Undang-Undang desa tersebut, Realisasi pembangunan belum terimplementasi disebabkan karena kurangnya dana pada desa dan kurangnya pengawasan kepala desa dan aparat desa terhadap program pembangunan desa

Keywords: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

ABSTRACT

Yenni Mawar F Br.Hutapea, NIM: 3123311064, implementation of Law No. 6 of 2014 About Rural Development in Implementing Tua In the village Deli Deli Serdang. civic Education and Social. Universitas Negeri Medan.

This study aims to determine the implementation of Law No. 6 of 2014 on the Implementation of Rural Development in Namorambe Deli Tua Subdistrict of Deli Serdang. The implementation of Law No. 6 of 2014 on the village bring change governance structures in the village, where the village government be given the authority to manage and run their own household settlements, including in the management of village finances. Management of village finances needs to be done by the village chief and supervision by the Village Consultative Body (BPD) and includes the village community. Expectations from the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village is to recognize the existence of the village, earning the Village Head and the Village is set clearly, the village received funding from Budget Negara (APBN), Strengthening Function Board Pemusyawaratan Rakyat (BPD), funds village instrumental to achieve food self-sufficiency and the involvement of communities in monitoring and supervision of rural development. The method used is a qualitative method. Data collection tools by interviewing the Village Head, Head of Development and Village Consultative Body (BPD), observation and questionnaires to 107 people selected by purposive sampling. Activities in the data analysis includes data reduction, data display and verification. It can be concluded from the lack of understanding of the Law No. 6 of 2014 villages in accordance with the results of a questionnaire given to 107 respondents selected by pporposive that people understand Unadang 12.15 Village Act, while respondents from the public 87.85 no understand the Law of the village, Actual construction has not been implemented due to lack of funds and lack of oversight at the village headman and village aperatur the rural development program

Keywords: Act No. 6 of 2014 on implementation of Village and Rural Development.